



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian kajian pustaka akan menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Landasan teori berisi konsep atau teori yang mendasari bidang yang sedang diteliti serta memperkuat atau mendukung variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu sebagai referensi serta perbandingan terhadap teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Kerangka pemikiran menggambarkan alur hubungan antara masing-masing variabel penelitian serta menjelaskan hubungan variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Dari pembahasan tersebut, maka peneliti dapat menarik suatu hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari masalah yang diteliti.

### A. Landasan Teoritis

#### 1. Teori Legitimasi

Legitimasi adalah persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas diinginkan, sesuai, atau sesuai dalam suatu sistem norma, nilai, keyakinan, dan definisi yang dibangun secara sosial (Suchman, 1995). Organisasi mengejar legitimasi untuk berbagai alasan dan temuan tentang signifikansi, kompleksitas, dan efektivitas kegiatan legitimasi dapat bervariasi tergantung pada tujuan di mana mereka dinilai. Menurut perspektif berorientasi sistem, entitas dipengaruhi oleh masyarakat di mana ia beroperasi (Deegan, 2002). Salah satu cara penting manajemen dapat mempengaruhi bagaimana organisasi dilihat oleh orang lain adalah dengan membuat kebijakan pengungkapan perusahaan.



Menurut Ningsih dan Cheisviyanny (2019) menjelaskan bahwa teori legitimasi menekankan perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku di masyarakat di mana mereka beroperasi. Agar perusahaan diterima dengan baik oleh masyarakat, mereka harus mendapatkan penakuan masyarakat dengan mengungkapkan dan menerapkan *corporate social responsibility*. Perusahaan memiliki legalitas setelah diterima oleh masyarakat.

Secara umum, organisasi berusaha untuk menstabilkan dan mengendalikan lingkungan mereka untuk mengurangi stres dan ketidakpastian. Tuntutan yang dihadapi perusahaan dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu kinerja bisnis terkait dengan biaya sosial seperti keamanan produk, perlindungan lingkungan, dan teknologi yang tepat guna, serta legitimasi sosial dan politik bisnis swasta dalam hubungannya dengan negara dan masyarakat (Ullmann, 1979). Dalam menjalankan bisnis mereka, organisasi perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kinerja bisnis yang bertanggung jawab secara sosial serta pengaruh dan harapan pemerintah dan masyarakat agar dapat mempertahankan stabilisasi dan kelangsungan bisnis yang sukses dalam lingkungan yang dinamis.

#### a. Teori Legitimasi dan Kontrak Sosial

Zyznarska-Dworczak (2017) menyatakan bahwa teori legitimasi berpusat pada gagasan bahwa suatu perusahaan harus mempertahankan posisi sosialnya dengan memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan apa yang diinginkan masyarakat. Menurut Burlea dan Popa (2013), menyatakan bahwa teori legitimasi dilihat sebagai mekanisme yang membantu organisasi untuk secara sukarela menerapkan dan mengembangkan pengungkapan lingkungan dan sosial untuk memenuhi kontrak sosial mereka. Selanjutnya, seperti yang dijelaskan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Shocker dan Sethi (1973) kontrak sosial berlaku untuk semua lembaga sosial dan bisnis yang beroperasi dalam masyarakat. Kontrak sosial akan memungkinkan institusi sosial dan bisnis beroperasi di masyarakat. Perusahaan dan masyarakat memiliki hubungan yang tersurat dan tersirat. Terwujudnya tujuan sosial yang diinginkan bagi masyarakat secara keseluruhan dan pembagian keuntungan ekonomi, sosial, atau politik kepada kelompok yang menjadi sumber kekuasaan lembaga sosial dan bisnis ini akan memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan mereka. Mekanisme pengakuan perusahaan diberikan oleh kontrak sosial yang terbentuk antara organisasi dan masyarakat.

Sangat penting bagi suatu perusahaan untuk bertahan, terutama di masa-masa sulit. Das (2016) menyatakan bahwa teori legitimasi menekankan bagaimana pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan dipengaruhi oleh batasan yang ditetapkan oleh masyarakat agar perusahaan dapat diapresiasi dan tidak dipandang negatif oleh komunitasnya. Menurut teori legitimasi, perusahaan akan menyediakan informasi secara sukarela melalui laporan tentang kegiatan yang dianggap penting oleh manajemen bagi masyarakat. (Guthrie et al., 2006).

Burlea dan Popa (2013) mengatakan bahwa perusahaan harus menghindari keadaan di mana mereka dilihat oleh masyarakat sebagai tidak peduli dengan norma, standar, dan nilai-nilai mereka. Jika sebuah perusahaan tidak mengikuti prinsip-prinsip moral yang dipegang oleh komunitas di mana ia beroperasi, hal itu dapat menyebabkan gangguan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri dan bahkan dapat menyebabkan kegagalan perusahaan (Burlea & Popa, 2013). Menurut Burlea dan Popa (2013), perusahaan harus menunjukkan eksistensinya melalui tindakan ekonomi dan sosial yang sah tanpa mengancam masyarakat di mana ia beroperasi.

### **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Karena teori legitimasi bergantung pada gagasan bahwa harus ada kesepakatan sosial antara perusahaan dan masyarakat di mana ia beroperasi, dan kemudian mengikuti bahwa masyarakat akan memiliki peran semacam dalam apakah operasi perusahaan terus berhasil atau tidak (Branco & Rodrigues, 2006; Mohammed, 2018). Tanpa masyarakat memberikan legitimasi kepada organisasi yang beroperasi di ruangnya, Branco dan Rodrigues (2006) menegaskan, akan sulit bagi organisasi semacam itu untuk mempertahankan kepentingan pemangku kepentingan (Branco & Rodrigues, 2006). Mengingat peran yang dimiliki masyarakat terhadap potensi keberhasilan suatu organisasi, O'Donovan (2000) menyimpulkan bahwa organisasi yang sah adalah organisasi yang tindakannya dianggap oleh anggota masyarakat sesuai dengan sistem norma, nilai, dan keyakinan yang telah dibangun secara sosial. Ini didasarkan pada peran masyarakat terhadap kemungkinan keberhasilan suatu organisasi..

### **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

#### **b. Teori Legitimasi dan Pengungkapan**

Perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktivitasnya karena mereka terus berusaha untuk memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan peraturan dan standar masyarakat. Seiring berjalannya waktu, menjadi lebih jelas bahwa masyarakat memainkan peran yang signifikan dalam mempertahankan eksistensi suatu perusahaan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tugas masyarakat adalah memberikan legitimasi kepada perusahaan yang beroperasi di dalamnya.. Oleh karena itu, perusahaan harus diakui untuk menjadi perhatian yang berkelanjutan. Abreu (2015) berpendapat bahwa jika masyarakat mengetahui bahwa suatu perusahaan telah melanggar aturan sosial, kelangsungan hidup perusahaan dapat terancam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Normalnya, masyarakat tidak termasuk dalam perusahaan. Oleh karena itu, masyarakat bergantung pada laporan perusahaan untuk mendapatkan informasi tentang perusahaan. Jika operasi perusahaan melibatkan produksi barang, seperti pertambangan dan penggalian, kehutanan, dan perikanan, perilaku operasional dapat memberikan sinyal kepada masyarakat. Apakah suatu organisasi menganut teori legitimasi atau tidak, ditunjukkan oleh informasi dalam pengungkapan sosial dan lingkungan laporan perusahaan.

Menurut Mousa dan Hassan (2015), organisasi yang berusaha mendapatkan, mempertahankan atau memperbaiki legitimasi mereka akan memanfaatkan pengungkapan sosial dan lingkungan untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan ini. Telah terjadi peningkatan pengungkapan informasi kemasyarakatan tentang laporan perusahaan. Guthrie et al. (2006) menghubungkan teori legitimasi dengan peningkatan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan organisasi.

Menurut Seckin-Celik (2017), peristiwa seperti bencana dan kecelakaan lingkungan, skandal akuntansi perusahaan, krisis ekonomi, dan masalah serupa lainnya telah menyebabkan peningkatan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Menurut Das (2016), krisis keuangan global dan ketidakstabilan pasar keuangan mendorong perusahaan untuk mengevaluasi kembali sistem nilai mereka dan menekankan pentingnya legitimasi. Sangat jelas bahwa peristiwa-peristiwa yang disebutkan di atas, bersama dengan perkembangan lainnya, telah menempatkan perusahaan di bawah tekanan yang tak terbayangkan untuk menjadi transparan dan akuntabel.

Seperti yang ditunjukkan oleh Das (2016) dan Seckin-Celik (2017), peristiwa ini menyebabkan legitimasi berkurang. Diharapkan banyak kritik dan tekanan

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terhadap beberapa perusahaan ini karena mereka dianggap terlalu besar untuk gagal dan ditebus menggunakan uang pembayar pajak. Pengungkapan informasi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk mendapatkan kembali legitimasi.

Porter dan Kramer (2011) memberikan gagasan tentang kelangsungan hidup organisasi yang mendukung gagasan kami sebelumnya. Oleh karena itu, untuk melanjutkan operasinya, perusahaan akan membutuhkan legitimasi. Laporan masalah sosial dan lingkungan adalah salah satu cara untuk mendapatkan legitimasi. Burlea dan Popa (2013) setuju dengan hal ini. Mereka percaya bahwa karena tantangan baru di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, pemerintah dan organisasi harus secara sukarela mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan untuk menunjukkan kepatuhan mereka.

### c. Gap Legitimasi

Perusahaan-perusahaan tampaknya bersaing untuk mendapatkan legitimasi. Intinya, apa yang kita pelajari dari Guthrie et al. (2006) adalah bahwa harapan masyarakat tidak permanen; mereka berevolusi. Guthrie et al. (2006) menunjukkan kecocokan antara tindakan institusional dan nilai-nilai sosial dapat dicapai pada suatu titik. Pandangan Guthrie et al. (2006) didukung oleh Islam (2017). Oleh karena itu, proses legitimasi antara berbagai pihak terus ditargetkan karena peristiwa atau kejadian baru yang dapat mengancam legitimasi perusahaan atau kejadian yang telah mengancam legitimasi sebelumnya dapat terulang kembali.

Fakta bahwa legitimasi adalah target yang bergerak berarti bahwa organisasi harus pragmatis. Menurut Guthrie et al. (2006), perusahaan yang responsif terhadap lingkungannya dianggap pragmatis. Selanjutnya, mereka harus

## C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

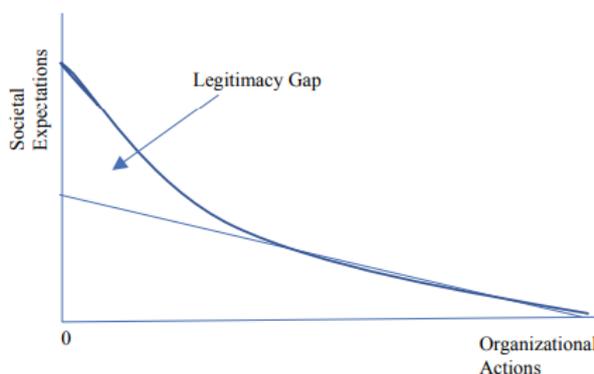
membuat ungkapan untuk menunjukkan bahwa mereka beradaptasi dengan dinamika lingkungan di mana mereka hidup.

Saat ini, perubahan yang terjadi pada lingkungan tempat perusahaan beroperasi akan mengubah harapan. Guthrie et al. (2006) mengusulkan bahwa perubahan seperti itu membawa pergeseran ke legitimasi, yang pada gilirannya menyebabkan "gap legitimasi". Menurut Lindblom (1994) menggambarkan konsep ini sebagai "perbedaan antara harapan pemangku kepentingan terkait yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan harus bertindak, dan bagaimana organisasi bertindak". Menurut Islam (2017), *gap* legitimasi didasarkan pada hubungan persepsi, yang menerima hubungan antara perusahaan dan masyarakat.

Gambar 2.1 secara grafis menggambarkan konsep *gap* legitimasi. Seperti dibahas di atas, kesenjangan legitimasi mengacu pada "perbedaan antara harapan pemangku kepentingan terkait yang berkaitan dengan bagaimana organisasi harus bertindak, dan bagaimana organisasi bertindak". Kami pikir *gap* legitimasi akan ditunjukkan oleh panah yang menunjuk ke ruang antara kurva yang menunjukkan harapan yang berubah, sementara tindakan organisasi tetap konstan.

**Gambar 2. 1**

**Presentasi grafis *legitimacy gap***



Sumber: (Moloi & Marwala, 2020)

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Islam (2017) mengemukakan bahwa ada dua sumber utama kesenjangan legitimasi, yang digambarkan sebagai berikut:

- a. Perubahan harapan masyarakat, ini menyebabkan pergeseran dari apa yang diharapkan dari organisasi ke apa yang sebenarnya dapat diberikannya. Dalam hal ini, Islam (2017) menunjukkan bahwa "harapan masyarakat akan berubah, yang mengarah pada kesenjangan". Kesenjangan muncul karena praktik organisasi tidak berubah.
- b. Asimetri informasi, ini adalah perubahan yang merupakan hasil dari munculnya informasi yang sebelumnya tidak diketahui tentang organisasi (Islam, 2017).

Nasi et al. (1997) mengacu pada perubahan yang merupakan hasil dari munculnya informasi yang sebelumnya tidak diketahui tentang organisasi sebagai bayangan organisasi. Dengan demikian, Nasi et al. (1997) mengajukan bahwa "badan informasi potensial tentang korporasi yang tidak tersedia untuk umum berdiri sebagai ancaman potensial konstan terhadap legitimasi korporasi. Ketika bagian dari bayangan organisasi terungkap, baik secara tidak sengaja atau melalui kegiatan kelompok aktivis atau jurnalis, *gap* legitimasi dapat tercipta.

Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa informasi ini yang tidak akan tersedia untuk umum menjadi bom waktu bagi reputasi organisasi. Ini menempatkan legitimasi organisasi dipertaruhkan. Sebagai mitigasi, Lindblom (1994) menunjukkan bahwa *gap* legitimasi datang dengan ancaman terhadap legitimasi organisasi dan oleh karena itu perlu ditangani dengan baik.

Menurut Islam (2017), sebuah organisasi harus menerapkan strategi untuk mengatasi *gap* legitimasi. Organisasi yang tidak memiliki strategi legitimasi akan rentan, dan ini akan diperburuk jika ancaman muncul. Fiedler dan Deegan (2002)



menyarankan bahwa strategi tersebut dapat mencakup pengungkapan yang ditargetkan dan berkolaborasi dengan entitas lain yang, dalam diri mereka sendiri, dianggap sebagai legitimasi.

Menurut Lindblom (1994), ada empat jalur tindakan yang dapat diikuti organisasi untuk mempertahankan legitimasi. Organisasi dapat berusaha untuk:

- a. Mendidik dan menginformasikan pemangku kepentingan yang relevan tentang perubahan aktual dalam kinerja dan kegiatan organisasi;
- b. Mengubah persepsi publik yang relevan tetapi tidak mengubah perilaku aktualnya;
- c. Memanipulasi persepsi dengan mengalihkan perhatian dari masalah yang menjadi perhatian ke masalah terkait lainnya; dan
- d. Mengubah ekspektasi eksternal terhadap kinerjanya

Apa artinya ini dalam praktik? Mousa dan Hassan (2015) menguraikan langkah-langkah praktis dari empat jalur tindakan yang disarankan oleh Lindblom (1994). Ini adalah di bawah ini:

- a. Organisasi dapat menyesuaikan output, tujuan, dan metode operasinya agar sesuai dengan definisi legitimasi yang berlaku.
- b. Suatu organisasi dapat mencoba, melalui komunikasi, untuk mengubah definisi legitimasi sosial sehingga sesuai dengan praktik, output, dan nilai-nilai organisasi saat ini.
- c. Organisasi dapat berusaha, melalui komunikasi, untuk diidentifikasi dengan simbol, nilai-nilai atau lembaga yang memiliki basis legitimasi yang kuat.
- d. Perusahaan mungkin berusaha untuk mencapai legitimasi dengan tampil melakukan hal yang benar atau tidak terlibat dalam melakukan hal yang salah

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ketika penampilan ini mungkin memiliki sedikit kesamaan dengan kinerja lingkungan aktual perusahaan

Dalam pandangan O'Donovan (2000), saat legitimasi terancam, sebuah organisasi akan memulai proses legitimasi yang ditargetkan pada kelompok-kelompok yang dianggapnya sebagai "perundingan publik". Ini menuntut organisasi untuk benar-benar melibatkan diri dalam mengelola masalah legitimasi. Islam (2017) menyarankan bahwa mengelola legitimasi secara efektif mengharuskan organisasi untuk mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Mengidentifikasi publik yang menganugerahkannya;
- b. Menetapkan nilai-nilai sosial dan lingkungan publik yang menganugerahkan dan persepsi variabel tekanan publik korporasi;
- c. Memutuskan tujuan dari setiap respon organisasi potensial terhadap ancaman legitimasi; dan
- d. Memutuskan taktik dan opsi pengungkapan apa yang tersedia dan cocok untuk mengelola legitimasi terkait dengan tujuan respons organisasi (Islam, 2017).

Karena teori legitimasi dianggap sebagai sumber daya vital di mana organisasi bergantung untuk bertahan hidup, sebuah organisasi akan mengejar strategi untuk memastikan kelangsungan hidupnya yang berkelanjutan (Mousa & Hassan, 2015). Organisasi perlu hati-hati mengelola perilaku mereka dan persepsi yang dimiliki masyarakat tentang hal itu.

Cormier dan Gordon (2001) mengingatkan kita bahwa legitimasi didasarkan pada persepsi, jika bom meledak, organisasi yang bersangkutan harus merumuskan tindakan perbaikan. Agar tindakan perbaikan mempengaruhi pihak

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



eksternal, mereka harus mengatasi masalah inti. Selanjutnya, tindakan perbaikan ini harus disertai dengan pengungkapan yang dipublikasikan. Akibatnya, Deegan (2002) menyatakan bahwa menjadi penting untuk mengelola proses ini melalui pengungkapan perusahaan yang dipublikasikan dan dokumen lain yang dirilis secara publik.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2. Teori Pemangku Kepentingan

Menurut Freeman & David (1983) menjelaskan bahwa teori pemangku kepentingan merupakan hubungan antara pemangku kepentingan di perusahaan dengan pemegang saham yang memiliki komitmen dan tidak dapat dilanggar. Tujuan teori pemangku kepentingan adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam mengoptimalkan pertimbangan nilai dampak dari kegiatan yang dilakukan dan mengurangi kemungkinan kerugian bagi pemangku kepentingan mereka.

Definisi pemangku kepentingan mencakup arti luas dan arti sempit (Freeman & David, 1983). Dalam konteks yang lebih luas, pemangku kepentingan merujuk pada kelompok atau individu yang memiliki kemampuan memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan suatu organisasi. Kelompok-kelompok ini mencakup berbagai pihak seperti masyarakat umum, kelompok protes, entitas pemerintah, asosiasi profesi, pesaing, serikat buruh, karyawan, pelanggan, pemegang saham, dan lainnya. Di sisi lain, dalam pengertian yang lebih sempit, pemangku kepentingan adalah setiap kelompok atau individu yang secara langsung tergantung pada organisasi untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Contohnya termasuk karyawan, pelanggan tertentu, pemasok khusus, lembaga pemerintah utama, pemegang saham, lembaga keuangan tertentu, dan sebagainya.

Konsep teori pemangku kepentingan juga menguraikan bahwa perusahaan tidak hanya bertujuan untuk keuntungan sendiri, melainkan juga harus

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memperhatikan manfaat bagi pemangku kepentingannya (Ghozali & Chairi, 2007).

Interaksi antara perusahaan dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan telah menciptakan tekanan bagi perusahaan untuk memperhatikan serta memenuhi keperluan dan tuntutan dari para pemangku kepentingan. Manajer memiliki tugas untuk memberikan klarifikasi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan melalui proses pengungkapan, dengan tujuan untuk tetap memiliki akses yang berkelanjutan terhadap sumber daya penting yang dapat diatur di masa mendatang. Perusahaan harus merancang strategi-strategi untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap lingkungan, dengan upaya memelihara hubungan yang positif dengan para pemangku kepentingan.

### 3. Teori Perubahan

Teori Perubahan adalah proses refleksi yang berkelanjutan untuk mengeksplorasi perubahan dan bagaimana itu terjadi - dan apa artinya untuk peran yang kita mainkan dalam konteks, sektor dan/atau kelompok orang tertentu (James, 2011). Teori perubahan menjelaskan bagaimana kegiatan dipahami untuk menghasilkan serangkaian hasil yang berkontribusi untuk mencapai dampak akhir yang dimaksudkan. Ini dapat dikembangkan untuk setiap tingkat intervensi – acara, proyek, program, kebijakan, strategi atau organisasi (Rogers, 2014). Terdapat beberapa tipe yang berbeda di dalam perubahan yang terjadi di lingkungan saat ini (Eguren, 2011).

a. Perubahan yang muncul, sebuah proses adaptif dan tidak teratur berdasarkan pembelajaran pengalaman, dan terjadi sebagai hasil dari perubahan yang tidak terduga dan / atau tidak direncanakan yang muncul dari dinamika yang disebut Kehidupan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



b. Perubahan transformatif, perubahan ini didasarkan pada tidak belajar dan membebaskan diri dari pola pikir, hubungan, identitas, lembaga formal dan non-formal, dll. yang menghalangi dan menunda kemungkinan penetapan realitas baru yang lebih adil dan adil dalam hal ekonomi, sosial dan politik.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Perubahan yang dapat diprediksi, perubahan yang didasarkan pada masalah yang rumit atau sederhana yang dapat diselesaikan melalui proyek-proyek tertentu dan tindakan yang direncanakan dari logika linear.

Proses merancang teori perubahan menekankan perubahan paradigma dari mana kita mendefinisikan realitas. Aksi yang diambil untuk mengubah realitas akan berasal dari melihat realitas dengan cara yang baru. Dengan kata lain, ketika kita mendekati dari perspektif yang berbeda pemikiran dan tindakan kita mengenai penyelesaian atau manajemen masalah yang kompleks, kita mengasumsikan bahwa kita dapat mencapai hasil yang berbeda (dan lebih baik) daripada yang bisa kita capai tanpa perubahan paradigma ini.

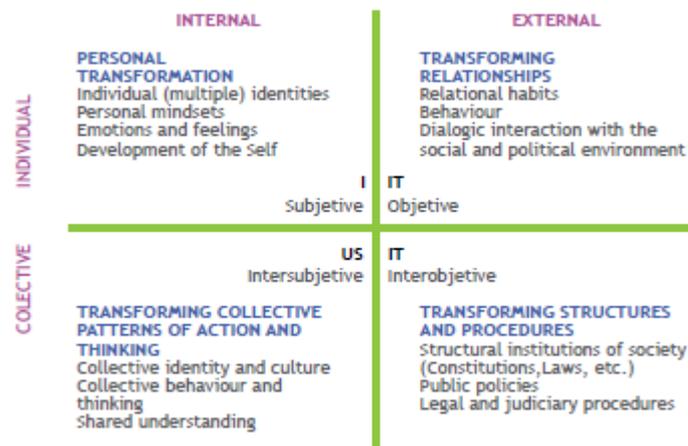
Diagram pada gambar 2.2 dibawah ini memungkinkan untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan terkait dengan pendekatan strategis yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan sebagai hasil dari implementasi inisiatif yang diusulkan oleh teori perubahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2. 2

Empat dimensi terhadap perubahan sosial



Sumber: (Eguren, 2011)

Lembaga adalah aturan permainan yang menentukan pemerintahan suatu masyarakat atau kelompok sosial tertentu (misalnya kelompok etnis, klan, asosiasi sosial, dll.), termasuk organisasi tertentu. lembaga-lembaga ini bergantung pada mekanisme yang memenuhi dan mengharuskan realisasi serangkaian norma-norma yang ditetapkan untuk memastikan penciptaan dan pemeliharaan kebaikan umum.

Terdapat 2 jenis institusi, yaitu formal dan informal.

- a. Lembaga formal, didasarkan pada norma tertulis dan mengatur hubungan dan prosedur formal yang mengatur masyarakat secara keseluruhan (yaitu konstitusi politik Negara, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dekrit menteri, dll) atau kelompok sosial atau perusahaan tertentu (yaitu prosedur administratif-bureaucratic dari perusahaan atau asosiasi produsen, yang ditetapkan oleh peraturan atau peraturan internal)
- b. Lembaga non-formal, Orang-orang, mekanisme, dinamika intangible dan tidak tertulis yang mengatur masyarakat atau kelompok sosial (yaitu korupsi sektor publik, sistem hukum konsensual berdasarkan hukum kebiasaan, hubungan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



berdasarkan keturunan atau patronage, homofobia dan misogyny, reciprocity berbasis komunitas, diskriminasi dan rasisme, Gandhi di India, kewarganegaraan dan keluarga, dll.)

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Perubahan adalah proses yang dinamis dan tidak permanen. Artinya, mereka berevolusi sebagai hasil dari interaksi yang dinamis dan muncul yang terus menerus melalui tahap yang berbeda. Meskipun kita mungkin berencana untuk secara aktif mempromosikan interaksi tertentu dan proses perubahan, hasil yang muncul dari mereka cukup tidak pasti dan tidak dapat sepenuhnya dikendalikan. Untuk menyederhanakan dan mengilustrasikan secara didaktik urutan dinamis ini, dapat dikatakan bahwa, dalam satu atau lain cara, setiap proses perubahan melewati empat fase utama:

- a. Fase Kepuasan (Kompetensi Tidak Sadar), di mana tidak ada dinamika perubahan yang diciptakan sejak, dan masih, tidak ada kesadaran tentang kebutuhan untuk perubahan. Orang telah memperoleh dan mengintegrasikan serangkaian model mental, perilaku, praktik institusi, kebiasaan budaya, dinamika relasional, dll. dan tidak merasa relevan atau perlu untuk diubah.
- b. Fase Penolakan (Ketidakmampuan Tidak Sadar), persepsi bahwa sesuatu tidak bekerja dengan baik dan sudah ada penyimpangan antara apa yang ada dan apa yang seharusnya. Namun, ada resistensi untuk mengubah status *quo* karena takut akan ketidakberdayaan yang tidak diketahui, perilaku dan intelektual, atau untuk apa yang diharapkan menjadi reconfiguration yang tidak diinginkan dari struktur kekuasaan.
- c. Fase Kebingungan (Ketidakmampuan Sadar), para aktor termotivasi untuk melakukan perubahan setelah resistensi awal diatasi. Ini mungkin terjadi karena para aktor yang puas tidak dapat lagi tinggal di fase itu karena tekanan massa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kritis yang tidak puas yang menuntut perubahan (motivasi ekstrinsik). Atau, sekelompok individu merasakan kebutuhan untuk perubahan karena situasi pribadi mereka (kemiskinan, pengecualian, dll.) dan datang bersama-sama mengklaim perubahan. (intrinsic motivation). Namun, tidak terlalu jelas bagaimana untuk maju atau arah apa yang harus diambil karena proses perubahan begitu baru, tidak diketahui, dan tidak pasti. Aktor yang berbeda tidak dapat sepakat tentang apa jalan untuk perubahan. Atau mereka mungkin merasa kurang kompetensi untuk melakukan perubahan yang diinginkan dan perlu mengembangkan kapasitas baru untuk perubahan.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

d. Fase Renovasi (Kompetensi Sadar), Mulai dari kebutuhan eksplisit dan sadar untuk mengembangkan alternatif baru, ada pergerakan menuju dinamika kebijakan yang didukung oleh massa kritis. Kebutuhan untuk perubahan diterima secara individu dan sosial; dan konteks baru ini membantu pengembangan kondisi yang diperlukan untuk perubahan yang diinginkan terjadi. Ada awal dari proses perubahan, transformasi dan pembaharuan yang berhasil mengkonsolidasikan fondasi untuk perubahan. Sistem ini mampu mengkonfigurasi kembali dinamika keseimbangan dan, secara bertahap, ada kemajuan menuju urutan baru.

Dalam setiap proses partisipatif ada hubungan langsung antara penggunaan kekuasaan, basis pengetahuan dan identitas yang mempengaruhi posisi dan kepentingan aktor yang terlibat. Seperti yang akan kita lihat, aktor yang berbeda dapat menggunakan kekuasaan dalam banyak cara yang berbeda. Beberapa dinamika kekuasaan dapat membantu mengintegrasikan dalam cara (lebih) horizontal dan inklusif berbagai jenis pengetahuan yang ada di antara aktor yang berpartisipasi dalam proses. Sebaliknya, penggunaan kekuasaan yang menindas oleh yang kuat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dapat membatasi kemungkinan untuk mengenali dan mengakui identitas dan jenis pengetahuan tertentu sebagai valid dan relevan. Misalnya, tidak mengakui dan memasukkan pengetahuan pribumi dalam proses pengambilan keputusan yang didominasi oleh badan-badan pemerintah yang berpikiran Barat atau yang memiliki kecenderungan diskriminatif, tidak menempatkan nilai pada dan tidak mengintegrasikan pengetahuan perempuan ketika datang ke pembuatan kebijakan yang ditujukan untuk kelompok-kelompok sosial ini, dan penolakan oleh otoritas kota dan teknisi untuk mempertimbangkan inisiatif warga sebagai alternatif untuk proposal resmi mengenai penyediaan jalan umum, kebijakan sosial, atau pembangunan taman lingkungan (perencanaan perkotaan), dll.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### 4. *Environmental, Social, and Governance (ESG)*

*Environmental, Social, and Governance (ESG)* adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menilai praktik dan kinerja bisnis organisasi pada berbagai masalah keberlanjutan dan tanggung jawab. Investasi ESG mengacu pada seperangkat standar untuk perilaku perusahaan yang digunakan oleh investor yang sadar sosial untuk menyaring investasi potensial. Kecepatan di mana metrik ESG dilaporkan berada pada lintasan yang luar biasa. Sebagian besar sebagai tanggapan terhadap meningkatnya minat investor dan masyarakat, semakin banyak organisasi memfokuskan perhatian mereka pada pelaporan kinerja ESG mereka dan menargetkan peningkatan kinerja keberlanjutan, didorong oleh tujuan ESG (IBM, 2022). Menanggapi kesenjangan antara permintaan informasi ESG oleh investor dan pasokan informasi tersebut oleh perusahaan, beberapa negara telah memulai peraturan pengungkapan ESG wajib untuk memaksa perusahaan mengungkapkan informasi berkualitas tinggi tentang isu-isu ESG baik bersama-sama dengan pengungkapan keuangan tradisional atau dalam laporan mandiri khusus. Selain

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



inisiatif tingkat negara ini, ada upaya signifikan di tingkat global untuk merancang, menyelaraskan, dan akhirnya mengamanatkan standar pengungkapan ESG internasional (Krueger et al., 2021).

**a. Sustainability**

Menurut Komisi Brundtland, sebuah lembaga penyelidikan yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1980, seperti yang diuraikan dalam buku yang ditulis oleh Scott (2013), *sustainability* atau keberlanjutan diartikan sebagai suatu bentuk perkembangan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Scott (2013) juga mengemukakan definisi tersendiri bahwa *sustainability* merupakan suatu proses atau aktivitas jangka panjang yang berkelanjutan, memungkinkan atau menyebabkan suatu hal untuk terus berlanjut seiring berjalannya waktu; suatu tindakan atau proses yang menjaga kelangsungan suatu hal agar tetap ada atau berjalan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks bisnis, keberlanjutan melibatkan berbagai proses dan kegiatan yang bertujuan menjaga kelangsungan suatu usaha seiring berjalannya waktu.

*The Oxford English Dictionary* (2005) memberikan penjelasan bahwa keberlanjutan berkaitan dengan produk alami dan energi yang dirancang untuk tidak merusak alam, memiliki kemampuan untuk berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Robertson (2014) menjelaskan bahwa keberlanjutan merujuk pada sistem dan proses yang dapat beroperasi dan bertahan sendiri dalam jangka waktu yang lama. Konsep sistem menjadi elemen pokok dalam keberlanjutan, di mana komponen-komponennya saling terkait dan terorganisir. Bumi, sebagai tempat tinggal manusia, dianggap sebagai suatu sistem yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terdiri dari berbagai ilmu biofisika dalam jaringan tiga dimensi yang kompleks dan terhubung satu sama lain. Bumi, sebagai planet yang kaya dengan berbagai ekosistem, seperti padang pasir, padang rumput, hutan, sungai, laut, kedalaman tanah, dan lapisan atmosfer, dianggap sebagai sistem yang sangat kompleks. Apapun bidang yang dipelajari manusia, akan selalu ditemukan pola yang menghubungkan seluruh ekologi tersebut.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**b. Global Reporting Initiative (GRI)**

*Global Reporting Initiative* (GRI) adalah organisasi standar independen internasional yang menyediakan kerangka kerja yang diakui secara luas untuk pelaporan keberlanjutan. Hal tersebut dapat membantu bisnis, pemerintah, dan organisasi lainnya memahami dan mengkomunikasikan dampaknya pada isu-isu seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan korupsi. Standar GRI mencakup berbagai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial, dan meningkatkan transparansi organisasi, meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan, dan membantu mengurangi risiko organisasi. GRI penting karena menyediakan pendekatan standar untuk pelaporan keberlanjutan, meningkatkan akuntabilitas, dan membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan, mengingat sifat transparan GRI. Selain itu, Standar GRI membantu mengurangi dampak negatif potensial pada lingkungan, masyarakat, dan operasi bisnis.

Setiap organisasi melaporkan pada topik yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dari organisasi dan yang penting bagi para pemangku kepentingan (Global Reporting Initiative, 2022). Dengan Standar GRI, ini adalah “topik material” yang dilaporkan oleh organisasi. Topik-topik materi organisasi ditentukan berdasarkan kegiatan dan hubungan bisnis organisasi. Privasi data, misalnya, bisa menjadi materi bagi perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



telekomunikasi untuk melaporkan, sementara kerja anak mungkin menjadi materi untuk perusahaan pakaian dengan rantai pasokan yang luas.

Standar GRI menawarkan pengungkapan tentang berbagai topik keberlanjutan. Dari anti-korupsi hingga air, biodiversitas hingga kesehatan dan keselamatan kerja, Standar ini mencakup topik yang relevan di seluruh dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial. Organisasi memilih dari antara mereka untuk melaporkan dampak signifikan mereka. Standar GRI sering diperbarui untuk memperbarui topik yang ada saat mereka berkembang dan untuk mencakup topik baru. Standar GRI disusun sebagai serangkaian standar yang saling terkait. Ada tiga standar universal yang berlaku untuk setiap organisasi yang mempersiapkan laporan keberlanjutan. Sebuah organisasi kemudian memilih dari set Standar GRI khusus topik untuk melaporkan pada topik materialnya. Standar-standar GRI yang spesifik dibagi menjadi tiga seri: 200 (Ekonomi), 300 (Lingkungan), dan 400 (Sosial).

#### 1) 100 Series – Universal Standards

Standar Universal mendukung organisasi dalam mengidentifikasi topik-topik pentingnya, dan menetapkan prinsip-prinsip penting yang harus digunakan saat mempersiapkan laporan. Mereka juga berisi pengungkapan tentang konteks spesifik organisasi, seperti ukuran, kegiatan, pemerintahan, dan keterlibatan pemangku kepentingan, yang semuanya membantu untuk lebih memahami pendekatan terhadap berbagai topik yang dilaporkan.

#### 2) 200 Series – Economic

Dalam konteks Standar GRI, dimensi ekonomi keberlanjutan mengacu pada dampak organisasi pada kondisi ekonomi para pemangku kepentingan,

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan pada sistem ekonomi pada tingkat lokal, nasional, dan global. Ia tidak berfokus pada kondisi keuangan sebuah organisasi.

3) 300 *Series – Environmental*

Dalam konteks Standar GRI, dimensi lingkungan dari keberlanjutan mengacu pada dampak organisasi pada sistem alam hidup dan non-hidup, termasuk darat, udara, air dan ekosistem.

4) 400 *Series – Social*

Dalam konteks Standar GRI, dimensi sosial keberlanjutan berkaitan dengan dampak organisasi pada sistem sosial di mana ia beroperasi.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**c. Sustainable Development Goals (SDGs)**

*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah set dari 17 tujuan global yang saling terkait yang ditetapkan oleh PBB untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan. Tujuan-tujuan ini berfungsi sebagai bentuk *blueprint* bersama untuk perdamaian dan kemakmuran bagi orang-orang dan planet, sekarang dan di masa depan. Setiap tujuan memiliki target dan indikator khusus untuk mengukur kemajuan menuju pencapaian mereka pada tahun 2030.

*Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki 17 tujuan pembangunan yang berkelanjutan dengan masing-masing target pencapaiannya (United Nations, 2015).

- 1) *Goal 1: No Poverty*. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana-mana.
- 2) *Goal 2: Zero Hunger*. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 3) *Goal 3: Good Health and Well-being.* Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua di segala usia.
- 4) *Goal 4: Quality Education.* Memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.
- 5) *Goal 5: Gender Equality.* Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
- 6) *Goal 6: Clean Water and Sanitation.* Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
- 7) *Goal 7: Affordable and Clean Energy.* Memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
- 8) *Goal 8: Decent Work and Economic Growth.* Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, pekerjaan penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- 9) *Goal 9: Industry, Innovation, and Infrastructure.* Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan inklusi dan industrialisasi berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
- 10) *Goal 10: Reduced Inequalities.* Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara.
- 11) *Goal 11: Sustainable Cities and Communities.* Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
- 12) *Goal 12: Responsible Consumption and Production.* Memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.
- 13) *Goal 13: Climate Action.* Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 14) *Goal 14: Life Below Water*. Melestarikan dan menggunakan lautan, laut, dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
- 15) *Goal 15: Life on Land*. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan penggunaan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan cadangan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.
- 16) *Goal 16: Peace, Justice, and Strong Institutions*. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.
- 17) *Goal 17: Partnerships for the Goals*. Memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Laporan Pembangunan Berkelanjutan Global 2019 mengemukakan kerangka kerja organisasi untuk transformasi yang diperlukan untuk mencapai *Sustainable Development Goals* dengan mengusulkan enam titik masuk (United Nations, 2023).

- 1) *Human well-being and capabilities*, Kesejahteraan material dan kelangsungan hidup, kesehatan, keamanan, pendidikan, suara dan pemberdayaan, dan akses ke lingkungan yang bersih dan aman adalah semua bagian dari kemakmuran manusia. Ketika kebutuhan dasar orang terpenuhi, mereka mengembangkan kemampuan untuk mendorong kemajuan dan transformasi sosial, ekonomi dan lingkungan global.
- 2) *Sustainable and just economies*, Perkembangan dan aktivitas ekonomi berharga karena dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia, bukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri. Status quo ekonomi saat ini

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



didefinisikan oleh ketidaksetaraan yang parah dan kehancuran lingkungan, dan untuk bergerak menuju sistem ekonomi yang berkelanjutan dan adil, perubahan besar dalam cara orang hidup, bekerja, memproduksi dan mengkonsumsi akan diperlukan.

- 3) *Sustainable food systems and healthy nutrition*, Sistem makanan saat ini adalah kombinasi kompleks dari sistem pertanian, pengolahan, perdagangan dan transportasi lokal, nasional, regional dan global yang tidak berkelanjutan, dan sistem ritel, dengan hubungan yang jelas dengan masalah kesehatan dan ekuitas di seluruh dunia. Pergeseran ke sistem makanan yang berkelanjutan akan membutuhkan perubahan mendalam dalam produksi, distribusi, ritel, konsumsi, diet, menangani limbah makanan dan kerugian termasuk penggunaan ulang.
- 4) *Energy decarbonization*, Agenda 2030 berkomitmen untuk akses universal ke energi dan dekarbonisasi sumber energi di seluruh dunia. Mengatasi krisis iklim akan berarti menjauh dari bahan bakar fosil dan menghentikan penggunaan bahan bakar padat yang mengganggu untuk memasak, yang sangat penting untuk menghindari 3,8 juta kematian tahunan saat ini karena polusi udara dalam ruangan.
- 5) *Urban and peri-urban development*, Setengah dari populasi dunia sekarang tinggal di kota, dan urbanisasi diperkirakan akan meningkat. Keadilan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan kohesi, dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas di daerah perkotaan dan peri urban. Ini juga akan penting untuk memulihkan daerah pedesaan.
- 6) *Global environmental commons*, Pencapaian seluruh Agenda 2030 akan tergantung pada perlindungan sumber daya bersama – atmosfer, hidrosfer,

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

lautan global, kriosfer, wilayah kutub, hutan, darat, air tawar dan keanekaragaman hayati.

#### **d. Aspek Material dan *Boundary***

Aspek Material dan *Boundary* merupakan salah satu pengungkapan standar yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) dengan indikator G4-17 hingga G4-23. Pengungkapan standar ini memberikan gambaran keseluruhan tentang proses yang telah diikuti oleh organisasi untuk menentukan Konten Laporan, Aspek Material, *Boundary* Teridentifikasi, serta pernyataan ulang (GSSB, 2013). Berikut adalah langkah-langkah dalam menentukan Aspek Material dan *Boundary*.

##### 1) Langkah 1: Identifikasi

- a) Pertimbangkan daftar Aspek GRI dan topik penting lainnya.
- b) Terapkan Prinsip Konteks Keberlanjutan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan: Identifikasi Aspek – dan topik relevan lainnya – berdasarkan dampak yang relevan terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial yang terkait dengan semua kegiatan, produk, layanan, dan hubungan organisasi, atau pada pengaruh yang dimilikinya terhadap asesmen dan keputusan pemangku kepentingan.
- c) Identifikasi tempat terjadinya dampak: di dalam atau di luar organisasi.
- d) Cantumkan Aspek dan topik lainnya yang dianggap relevan, serta *Boundary*.

##### 2) Langkah 2: Prioritasi

- a) Terapkan Prinsip Materialitas dan Pelibatan Pemangku Kepentingan: Nilai setiap Aspek dan topik lainnya yang dianggap relevan pada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



**KWIK KIAN GIE**  
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



signifikansi dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi, serta pengaruh terhadap asesmen dan keputusan pemangku kepentingan.

- b) Identifikasi Aspek Material dengan menggabungkan asesmen tersebut.
- c) Tentukan dan dokumentasikan nilai ambang (kriteria) untuk menentukan sebuah Aspek menjadi material.
- d) Untuk setiap Aspek Material yang teridentifikasi, putuskan tingkat cakupan, jumlah data, dan penjelasan naratif yang akan diungkapkan.
- e) Cantumkan Aspek Material yang akan disertakan dalam laporan, beserta *Boundary* dan tingkat cakupannya.

### 3) Langkah 3: Validasi

- a) Terapkan Prinsip Kelengkapan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan: Lakukan asesmen pada daftar Aspek Material terhadap Cakupan, Aspek Boundary, dan Periode untuk memastikan bahwa laporan tersebut memberikan representasi yang wajar dan seimbang dari dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi yang signifikan dan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi.
- b) Setujui daftar Aspek Material yang teridentifikasi bersama pembuat keputusan senior internal yang relevan.
- c) Siapkan sistem dan proses untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk diungkapkan.
- d) Terjemahkan Aspek Material teridentifikasi menjadi Pengungkapan Standar – DMA dan Indikator – sebagai dasar laporan.

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e) Tentukan informasi yang tersedia dan jelaskan mana yang masih diperlukan untuk membuat pendekatan manajemen dan sistem pengukuran.

4) Langkah 4: Reviu

- a) Terapkan Prinsip Konteks Keberlanjutan dan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan: Tinjau Aspek yang penting dari pelaporan periode sebelumnya.
- b) Gunakan hasil reviu untuk menjelaskan Langkah 1 Identifikasi untuk siklus pelaporan berikutnya.

Dalam menentukan isi laporan, menggunakan prinsip-prinsip pelaporan menurut Standar GRI 2016 berikut.

1) Inklusivitas Pemangku Kepentingan

Dalam pelaporannya, organisasi harus mengidentifikasi pemangku kepentingannya dan menjelaskan bagaimana organisasi telah memenuhi harapan dan kepentingan mereka.

2) Konteks Keberlanjutan

Kinerja organisasi harus dilaporkan dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas.

3) Materialitas

Laporan organisasi harus mencakup dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi atau yang memengaruhi penilaian dan keputusan pemangku kepentingan.

4) Kelengkapan

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Untuk memungkinkan pemangku kepentingan menilai kinerja organisasi, laporan organisasi harus mencakup topik material serta batasan yang mencerminkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang signifikan.

Selanjutnya pada tahap pelibatan pemangku kepentingan, dijelaskan melalui standar GRI G4 dan GRI 2016 sebagai berikut:

1) G4-24 (GRI 102-40)

Organisasi harus membuat daftar kelompok pemangku kepentingan yang terlibat tersedia.

2) G4-25 (GRI 102-42)

Untuk mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan yang dilibatkan, organisasi harus mengungkapkan dasar organisasi.

3) G4-26 (GRI 102-43)

Organisasi harus menjelaskan bagaimana mereka melihat keterlibatan pemangku kepentingan, berapa kali mereka terlibat, dan apakah keterlibatan termasuk dalam proses penyusunan laporan.

4) G4-27 (GRI 102-44)

Organisasi harus melibatkan pemangku kepentingan dan mengungkapkan topik dan masalah utama. Kemudian, mereka harus melaporkan tanggapannya terhadap masalah tersebut.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017**

Peraturan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017 mengenai Laporan Keberlanjutan untuk entitas seperti lembaga keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Menurut Otoritas Jasa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Keuangan (2017), Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang menggambarkan kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga keuangan, emiten, dan perusahaan publik dalam menjalankan fungsinya. Dalam peraturan tersebut, OJK menyebutkan beberapa informasi yang harus dimuat dalam Laporan Keberlanjutan:

1) Penjelasan Strategi Keberlanjutan

Bagian ini menjelaskan strategi perusahaan keberlanjutan yang telah ditetapkan

2) Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan

Pada bagian ini, entitas membandingkan kinerjanya selama tiga tahun terakhir dalam bidang ekonomi (jumlah produk dan jasa, pendapatan, dll.), lingkungan (energi yang digunakan, emisi dan limbah yang dikurangi, dll.), dan sosial (pengaruh terhadap masyarakat dan lingkungan).

3) Profil Singkat

Pada bagian ini, entitas memberikan gambaran tentang atributnya, seperti visi, misi, alamat, dan media yang dapat digunakan untuk menghubungi orang lain, serta skala bisnis, produk atau jasa, dll.

4) Penjelasan Direksi

Pada bagian ini, entitas menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk memenuhi strategi keberlanjutan yang dicanangkan, implementasi, dan strategi untuk mencapai target.

5) Tata Kelola Keberlanjutan

Pada bagian ini, entitas menjelaskan tanggung jawab yang diemban oleh penanggung jawab keberlanjutan entitas, prosedur untuk menangani risiko

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

penerapan keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial, dan penjelasan tentang pemangku kepentingan dan masalah yang dihadapi.

6) Kinerja Keberlanjutan

Selama tiga tahun terakhir, organisasi telah melakukan banyak hal untuk membangun budaya keberlanjutan dan melakukan perbandingan kinerja lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ini juga mencakup tanggung jawab pengembangan produk atau jasa.

7) Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen, jika ada

**f. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)**

Pada tahun 2021 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Permen LHK No. 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan. PROPER adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, PROPER merupakan upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan (PROPER, 2019). Sejak tahun 1995, perusahaan-perusahaan di Indonesia dipantau dan dievaluasi oleh PROPER dengan beberapa tujuan besar yang ingin dicapai (PROPER, 2022).

- 1) Mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dalam pelestarian lingkungan.
- 3) Meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 4) Meningkatkan kepatuhan dalam pengendalian dampak lingkungan melalui peran aktif masyarakat dan mengurangi dampak negatif kegiatan perusahaan terhadap lingkungan.

Pemerintah Indonesia melakukan penilaian dan pemeringkatan dengan memberikan warna yang menunjukkan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan mulai dari yang paling bawah yaitu, hitam, merah, biru, hijau, dan emas (PROPER, 2023).

- 1) Hitam, sengaja menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, melanggar peraturan perundang-undangan, dan tidak melaksanakan sanksi administrasi.
- 2) Merah, melakukan upaya pengelolaan lingkungan tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
- 3) Biru, melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang disyaratkan sesuai ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Hijau, melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya secara efisien serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik.
- 5) Emas, konsisten telah menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi dan jasa, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

HITAM sampai BIRU adalah kategori untuk perusahaan yang mematuhi peraturan (atau bisa dikatakan pada tingkat kepatuhan), sementara HIJAU dan EMAS melampaui kepatuhan.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### g. *Carbon Disclosure Project*

Standar pengungkapan mengenai emisi GRK dibuat oleh *Carbon Disclosure Project* (CDP). CDP adalah organisasi nirlaba yang beroperasi sebagai sistem global untuk pengungkapan bagi investor, perusahaan, kota, negara bagian, dan wilayah untuk mengelola dampak lingkungan mereka. Sejak saat itu, organisasi ini telah meluaskan lingkup pengungkapan lingkungan, termasuk deforestasi dan keamanan air, serta memperluas jangkauannya untuk mendukung kota, negara bagian, dan wilayah. Sebagai bagian dari kawasan Asia Tenggara dan Oceania, CDP telah berperan sebagai *platform* pelaporan yang efektif di Indonesia. Setiap tahun, jumlah pelaku yang berpartisipasi dalam pelaporan ini terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, lebih dari 100 perusahaan Indonesia, beserta 21 kota dan pemerintah daerah, memilih untuk menganalisis risiko iklim yang mereka hadapi melalui kerja sama dengan CDP Indonesia.

CDP menerbitkan panduan berupa *information request* bagi perusahaan untuk mengungkapkan emisi GRK. *Information request* merupakan sebuah kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan seputar perubahan iklim. Perusahaan yang hendak mengungkapkan informasi ini dengan suka rela, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di dalam laporan keberlanjutannya. Terdapat 15 modul di dalam *information request* yang terdiri dari: pendahuluan, tata kelola, risiko dan peluang, strategi bisnis, target dan kinerja, metodologi emisi, data emisi, gangguan emisi, energi, metrik tambahan, verifikasi, harga karbon, keterlibatan, dampak pengelolaan lahan lainnya, dependensi modul, dampak portofolio, keanekaragaman hayati, dan penutup. Di dalam 15 modul tersebut, berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai isu perubahan iklim yang terutama disebabkan oleh emisi GRK. Dari 15 modul tersebut, terdapat total 173

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pertanyaan yang harus dijawab oleh perusahaan yang ingin melakukan pengungkapan terkait emisi GRK.

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Choi et al. (2013), ia membuat sebuah *checklist* berdasarkan 173 pertanyaan yang terdapat pada *information request* yang diterbitkan oleh CDP. *Checklist* tersebut terdiri dari 18 pertanyaan (yang selanjutnya disebut dengan sub-kategori) dan mengkategorikannya menjadi 5 kategori besar, yaitu:

- 1) Perubahan iklim: risiko dan peluang
- 2) Akuntansi emisi GRK
- 3) Akuntansi konsumsi energi
- 4) Pengurangan GRK dan biaya
- 5) Akuntabilitas emisi karbon

Kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan, khususnya pengungkapan emisi GRK, dapat dilihat dari tingkat kesesuaian antara standar yang ada dengan laporan yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Laporan keberlanjutan dapat dikatakan berkualitas jika sudah mengungkapkan informasi-informasi berdasarkan standar yang ada. Perusahaan akan berusaha menyajikan informasi lingkungan sebagai bukti tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Tanggung jawab ini melibatkan biaya lingkungan, yaitu pengorbanan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah kemungkinan buruknya kualitas lingkungan atau untuk menanggulangi kerusakan lingkungan yang timbul akibat operasional perusahaan (Asjuwita & Agustin, 2020). Adanya biaya lingkungan di perusahaan diyakini dapat mengurangi emisi karbon dan cenderung menyebabkan perusahaan melakukan pengungkapan emisi karbon.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 5. *Social Return on Investment (SROI)*

Metode *Social Return on Investment (SROI)* muncul sebagai hasil dari pertumbuhan sosial enterprise yang begitu pesat di berbagai belahan dunia. Di sini, akuntabilitas menjadi komponen penting dalam mengevaluasi seberapa efektif program atau proyek sosial yang dijalankan. Di berbagai kancah forum internasional, isu-isu sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, lapangan pekerjaan, imigran, dan krisis ekonomi telah menjadi tren. Di samping itu, topik-topik tentang lingkungan hidup kini telah mendominasi pembicaraan di antara para petinggi negara-negara di dunia, seperti isu tentang pemanasan global, emisi gas karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), konservasi hutan tropis, eksplorasi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, dan sebagainya.

SROI merupakan sebuah metode yang dapat digunakan untuk mengukur nilai yang telah diciptakan (dampak) dilihat dari tiga aspek, yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi (Purwohedi et al., 2023). SROI digunakan untuk mengukur nilai uang (moneter) manfaat sosial dan kemudian membandingkan manfaat yang diterima publik dan swasta terhadap biaya yang dikeluarkan. Nicholls (2009) menyatakan bahwa SROI adalah metodologi yang digunakan untuk mengukur dan mempertimbangkan gagasan nilai yang lebih luas. Program ini berusaha untuk mengurangi kesenjangan dan degradasi lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan dengan memasukkan biaya dan manfaat sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi.

Analisis SROI merupakan analisis yang dilakukan dengan menetapkan dampak dan menilai dampak tersebut dengan menggunakan *financial proxy* dan pembobotan. Hasil rasio yang telah dihitung dari analisis SROI ini menunjukkan satu rupiah yang telah diinvestasikan akan menghasilkan dampak dengan nilai

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



rasio yang dihasilkan. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam analisis SROI (Purwohedi et al., 2023).

1) Menetapkan raung lingkup dan mengidentifikasi para pemangku kepentingan (*Establishing scope and identifying stakeholders*)

a) Menentukan ruang lingkup (*Establishing scope*)

Sebelum memulai analisis, sangat penting bagi seorang praktisi SROI untuk bertemu dan berbicara dengan demgam para pemangku kepentingan untuk menjawab pertanyaan terkait aktivitas, pembiayaan, dan tujuan. Ruang lingkup mencakup semua informasi yang diperlukan tentang program atau proyek yang akan dianalisis. Ini akan memberikan pengguna laporan SROI gambaran lengkap tentang karakteristik program atau proyek.

b) Mengidentifikasi pemangku kepentingan (*Stakeholders*)

Langkah pertama adalah menentukan siapa yang akan menjadi pemangku kepentingan dalam analisis SROI. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok orang atau organisasi yang merasakan perubahan, baik positif maupun negatif, yang disebabkan oleh program atau proyek yang sedang dievaluasi.

2) Memetakan dampak (*Mapping outcomes*)

a) Identifikasi *input* dan pemberian nilai *input*

*Input* dalam SROI terdiri dari tiga jnis, yaitu uang, waktu, dan barang. Ketiga hal tersebut adalah sumber daya yang diperlukan bagi sebuah program/proyek untuk dapat dijalankan. Oleh karena itu, SROI ingin memastikan bahwa ketiga hal tersebut diperhitungkan sebagai nilai investasi.



b) Mengklarifikasi *output*

*Output* menunjukkan dampak yang dapat dilihat dan dirasakan segera dari keberadaan sebuah program atau proyek. Praktisi SROI harus menentukan output dari program atau proyek yang akan dianalisis. Ini dapat dicapai dengan beberapa cara, seperti observasi, telaah literatur, wawancara, dan diskusi dengan pemangku kepentingan.

c) Menentukan manfaat

Menentukan manfaat apa saja yang telah dirasakan oleh penerima manfaat setelah sebuah fasilitas beroperasi atau sebuah program dijalankan. Praktisi SROI harus dapat mendengar dengan seksama setiap pendapat penerima manfaat (*stakeholders* yang paling relevan) tentang perubahan apa yang telah dirasakan setelah sebuah fasilitas berdiri atau suatu program dijalankan.

3) Membuktikan adanya dampak dan memberinya nilai (*Evidencing outcomes and giving them a value*)

a) Indikator

Indikator adalah sesuatu kejadian atau fakta di lapangan yang dapat dijadikan dasar bagi pengguna SROI bahwa perubahan itu memang benar adanya.

b) Ukuran keuangan (*Financial proxy*)

Tahapan ini merupakan tahapan yang paling krusial dalam implementasi SROI karena nilai nominal dari suatu *outcome* merupakan salah satu kelebihan SROI yang tidak dimiliki alat analisis lain, tetapi di sisi lain juga merupakan suatu tantangan tersendiri. Setiap *outcome* akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memiliki *financial proxy* yang akan digunakan untuk menghitung total *outcome (benefit)* suatu program/proyek.

c) *Jangka waktu (Duration)*

Waktu yang dimaksud adalah seberapa lama penerima manfaat dari suatu program atau fasilitas akan merasakan dampak dari program tersebut; dengan kata lain, seberapa lama penerima manfaat akan dapat merasakan perubahan positif secara signifikan.

4) *Menetapkan dampak (Establishing impact)*

Nilai suatu dampak yang telah ditentukan berapa besar nilai nominalnya pada tahap sebelumnya (penentuan *financial proxy*), harus melalui 4 bentuk filter yang akan menghasilkan nilai yang disesuaikan (*adjusted value*) sebagai *proxy* nilai nominal yang akan digunakan.

a) *Deadweight*: apakah dampak ini akan terjadi begitu saja?

*Deadweight* artinya seberapa besar suatu dampak akan terjadi begitu saja tanpa perlu adanya suatu program/proyek.

b) *Attribution*: siapa lagi yang berkontribusi terhadap dampak ini?

*Attribution* menunjukkan bahwa fasilitas tersebut bukan satu-satunya yang berkontribusi pada penciptaan dampak. Yang berkontribusi pada dampak, dapat bersumber dari pihak lain, program lain atau fasilitas lain yang dirasakan oleh penerima manfaat.

c) *Displacement*: apakah dampak menggantikan kebiasaan baik lain?

*Displacement* pada dasarnya menjawab pertanyaan apakah ada aktivitas bermanfaat lain yang justru tergantikan setelah program atau proyek yang memiliki SROI yang diukur.

d) *Drop-off*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*Drop-off* menunjukkan besarnya persentase penurunan nilai dampak setiap tahun. Ini menunjukkan bagaimana dampak akan tetap dirasakan dalam jumlah yang sama atau lebih sedikit setelah tahun kedua program atau proyek yang sedang dievaluasi berjalan.

5) Menghitung (*Calculate*) rasio SROI

Beberapa tahapan perhitungan nilai rasio SROI dapat dilakukan sebagai berikut.

- a) Menghitung total nilai *input* suatu fasilitas di suatu lokasi.
- b) Menghitung *adjusted value*, yaitu nilai setiap manfaat setelah dikurangi *filter* untuk setiap dampak.
- c) Setelah itu, hitung total *value* setiap *outcome* dengan menggunakan persentase *drop-off* selama jangka waktu tertentu.
- d) Dengan menggunakan data total *value* setiap tahun maka kini dapat dihitung *net present value*. Kemudian angka tersebut dapat dihitung menggunakan rumus rasio SROI sebagai berikut.

$$SROI = \frac{\text{Present Value of Impact}}{\text{Present Value of Investment}}$$

Sebagai contoh, jika rasio SROI yang dihasilkan sebesar 2,43 artinya, setiap Rp. 1 yang diinvestasikan untuk fasilitas atau program yang dilakukan dapat menghasilkan manfaat (*benefit*) sebesar Rp. 2,43 atau lebih besar Rp. 1,43 dibandingkan nilai investasinya.

6) Pelaporan, penggunaan, dan penetapan (*Reporting, using, & embedding*)

Analisis SROI harus dapat memastikan bahwa semua tahapan yang telah dilakukan sudah dikomunikasikan dengan baik dengan *stakeholder* yang terkait. Sebagai contoh, apabila rasio ini digunakan oleh pemerintah daerah maka rasio SROI ini harus dapat mengubah pandangan, cara kerja, sistem

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengawasan, perubahan organisasi dari pemerintah daerah tersebut maupun pemangku kepentingan secara keseluruhan. Jika rasio SROI yang dihasilkan sangat rendah maka ada proses perbaikan yang dilakukan. Perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) inilah yang akan menjadikan manfaat dari sebuah fasilitas/program dapat benar-benar dirasakan bagi masyarakat secara berkesinambungan (*sustainable development*).

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institus Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Penelitian Terdahulu

Ningsih & Meiden (2022) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penilaian Materialitas pada Laporan Keberlanjutan Industri Dasar dan Kimia Tahun 2020” meneliti pengungkapan informasi yang materialitas yang bertujuan untuk membatu pemangku kepentingan pada proses pengambilan keputusan. Penelitian ini meibatkan 14 perusahaan industri dasar dan kimia dan wawancara dengan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 14 perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan, sebanyak 3 perusahaan tidak menyajikan definisi materialitas dalam laporan keberlanjutan mereka. Proses penilaian materialitas melibatkan pemangku kepentingan yang berbeda, dan tidak semua perusahaan mengindikasikan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam seluruh tahap proses penilaian materialitas. Perusahaan-perusahaan tersebut mengidentifikasi berbagai masalah sebagai topik material dalam analisis materialitas, dengan sebagian besar mengelompokkan isu-isu tersebut di bawah tema sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dalam 6 dari 14 perusahaan, isu-isu material utama disajikan dengan pembagian tingkat materialitas, yaitu "Tinggi", "Sedang", dan "Rendah".

Ovina & Meiden (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Kualitas Pengungkapan Emisi Karbon pada Laporan Keberlanjutan” meilbatkan 5 emiten yang terdaftar pada indeks SRI-Kehati yang menerbitkan laporan keberlanjutan pada periode 2018-2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan penelitian, disimpulkan bahwa Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Jasa Marga (Persero) Tbk., dan Wijaya Karya (Persero) Tbk. memiliki tingkat kesesuaian dan kualitas pengungkapan emisi karbon yang tinggi selama lima tahun terakhir. Sementara itu, Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan Unilever Indonesia Tbk. menunjukkan tingkat kesesuaian dan kualitas pengungkapan yang lebih rendah. Secara kuantitatif, Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan Jasa Marga (Persero) Tbk. menonjol dengan kualitas pengungkapan yang tinggi, sedangkan Unilever Indonesia Tbk. dan Wijaya Karya (Persero) Tbk. memiliki kualitas pengungkapan yang rendah. Secara kualitatif, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menonjol dengan kualitas pengungkapan yang tinggi, sementara Jasa Marga (Persero) Tbk., Unilever Indonesia Tbk., dan Wijaya Karya (Persero) Tbk. memiliki kualitas pengungkapan yang sedang, dan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menunjukkan kualitas yang rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Parikesit et al. (2023) dengan judul “Analisis Dampak Investasi Sosial PT Perusahaan Gas Negara Tbk Diukur menggunakan *Social Return On Investment* (Studi Kasus Program Bank Sampah)” menjadi referensi penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur dampak dari investasi sosial yang dilakukan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Proses pengukuran dilakukan menggunakan *Social Return On Investment* (SROI) melalui program Bank Sampah). Penggunaan SROI dilakukan karena alat ini menawarkan kerangka partisipatif untuk mengukur dampak sosial bagi penerima manfaat dan pemangku kepentingan relevan lainnya. Berdasar hasil proses pertama adapun para pihak yang terlibat terdiri dari: (1) perwakilan Pengurus Bank Sampah sebanyak dua belas orang; (2) nasabah Bank Sampah sebanyak tiga belas orang; (3) perwakilan pemerintah, baik di tingkat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kelurahan, kecamatan, maupun dinas sebanyak delapan orang; (4) perwakilan masyarakat sebanyak 3 orang. Berdasar hasil penghitungan dampak sosial menggunakan SROI diketahui rasio atasnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, capaian rasio SROI sebesar 1 : 4,09 sebelum kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 dengan besaran 1 : 4,76. Nilai SROI *Ratio* merepresentasi setiap 1 Rupiah yang diinvestasikan PGN memberikan social value sebesar:(1) pada tahun 2020 sebesar Rp 4,09 dan (2) pada tahun 2021 sebesar Rp 4,76. Tren peningkatan atas pelaksanaan program terjadi karena kelompok yang terus melakukan inovasi atas pelaksanaan program Bank Sampah. Proses ini juga menjadi wujud nyata kontribusi pembangunan berkelanjutan, khususnya pada tujuan nomor 1 tanpa kemiskinan, nomor 3 hidup sehat, nomor 5 kesetaraan gender, nomor 6 air bersih dan sanitasi yang layak, dan nomor 17 kemitraan untuk mencapai tujuan.

### C. Kerangka Pemikiran

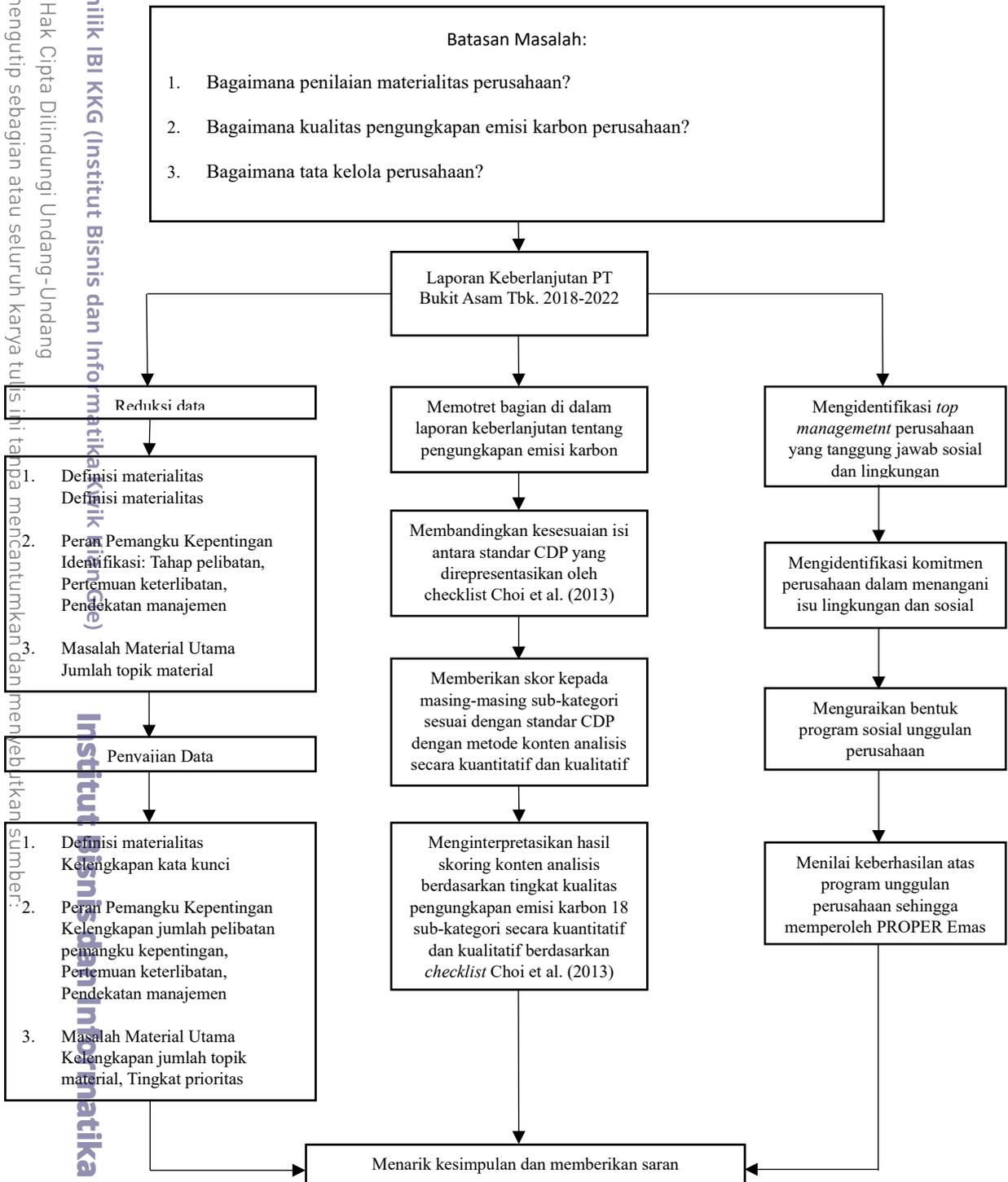
ESG terdiri dari *Environmental*, *Social*, dan *Governance*. Penerapan ESG yang dilakukan PT Bukit Asam Tbk. menggunakan prinsip inklusivitas pemangku kepentingan, yaitu melibatkan pemangku kepentingan dalam menentukan materialitas. Materialitas dijelaskan melalui penilaian materialitas, mulai dari mendefinisikan materialitas, keterlibatan pemangku kepentingan, dan jumlah masalah material utama. Hasil prinsip inklusivitas pemangku kepentingan, maka dilakukan penentuan materialitas melalui 4 tahap utama, identifikasi, prioritas, validasi, dan reviu. Topik material yang dihasilkan menggunakan prinsip materialitas, yaitu mencakup dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi atau yang memengaruhi penilaian dan keputusan pemangku kepentingan. Tingkat materialitas diungkapkan melalui matriks materialitas dengan tingkatan yang berbeda mulai dari rendah, sedang, dan tinggi. Terkait dengan



Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis membuat kerangka pemikiran atau alur

penelitian yang dijelaskan melalui gambar 2.3 sebagai berikut.

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.